



PT. BPR DHARMA INDRA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2022

🏠 JALAN SOEKARNO HATTA NO 8-10 SUKODONO , LUMAJANG

☎ 0334-88187

📠 (0334) 892228

Telah disesuaikan dengan

SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Dharma Indra mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Dharma Indra beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder, mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR DHARMA INDRA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan, pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Dharma Indra berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang ditetapkan OJK, sehingga dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memiliki daya saing tinggi, terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola yang baik untuk menjadikan PT BPR Dharma Indra sebagai perusahaan yang sehat.



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : YETI KUSWINDARYANTI,SE,M.HUM</p> <hr/> <p>NIK :</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggungjawab atas pelaks kepengurusan BPR 2.Mengelola BPR dan menerapkan Tata Kelola setiap kegiatan usaha BPR 3. Menindaklanjuti temuan Audit mastikan jumlah SDM yg memadai 5.Bertanggungjawab atas pelaks tgs pd pemegang saham dlm RUPS 6.Mengungkapkan kebijakan BPR yg bersifat strategis di bid kepegawaian 7. Tdk menggunakan penasihat/konsultan kecuali memenuhi persyaratan 8.Menyediakan data, informasi akurat, relevan, tepat wkt pd Dekom 9.Melaks pedoman dan tatib krj anggota Dir yg mencantumkan etika kerja, wkt kerja, peraturan rapat 10. Menyusun kebijakan dan pedoman MR 11.Mengevaluasi dan memutuskan trans yg memerlukan persetujuan Dir 12.mengembangkan budaya MR pd seluruh jenjang organisasi 13. Memastikan kompetensi SDM 14.Memastikan fungsi MR beroperasi sec independen 15. Bertanggungjawab ats pelaks kebijakan MR, eksposur risk 16.Mengambil tindakan yg sesuai dgn profil BPR 17.Pantau pengkinian profil risk dan transaksi nsbh 18.Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur APU PPT 19. Mengusulkan kebijakan, prosedur strategis mengenai APU PPT pd Dekom 20.Memastikan penerapan APU/PPT dilaks sesuai kebijakan dan prosedur 21.Membentuk UKK penerapan APU/PPT 22.Melaks pengawasan kepatuhan penerapan APU/PPT 23.Memastikan kebijakan dan prosesur penerapan APU/PPT sejalan dgn perkembangan modus PU/PPT 24.Memastikan peg telah mengikuti pelat penerapan APU/PPT 25.Menetapkan renc pengembangan, pengadaan TI, kebijakan dan prosedur TI 26. Pantau kinerja penyelenggaraan TI dan kompetensi SDM ttg TI 27.Membuat RBB dan kebijakan bank 28.Mengawasi dan mengkoordinir keg ops, kdt, meningkatkan TKS bank 29.Ttd laporan utk OJK, surat dinas utk pihak ketiga 30.menolak/setuju atas permohonan kdt nsbh 31.Melakukan analisa, menetapkan putusan LTKM, mantau pelaporannya ke PPATK 32.Konfirmasi ke lap sec langsung utk memperoleh kebenaran,</p>



		kelayakan hal survey 33. Menyelenggarakan RUPS atas persetujuan Dekom, memimpin rapat Dir/Kabag
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: IR.MADURATNASARI,M.HUM
	NIK	:
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Membantu Dirut memimpin dan mengkoordinir organisasi perusahaan 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian langsung pd masing-masing bagian 3. Menyusun rencana anggaran Cash Budget 2. Menyusun rencana kerja per bagian guna pencapaian target 5. Mengatur dan mengawasi pemeliharaan inventaris ktr, srt berharga milik nsbh yg dijamin ke Bank 6. Mengatur dan mengawasi pelaks prosedur kerja 7. Menyusun lap hsl evaluasi pelaks pekerjaan dan melaporkan ke Dirut 8. Membantu Dirut menjaga kerahasiaan Bank 9. Bersama Dirut menandatangani slip bank lain, otorisasi penarikan tab, pengeluaran biaya 10. Memberikan evaluasi prestasi, konduite dan hsl kerja 11. Mewakili Dirut membantu menyelesaikan permasalahan nasabah 12. Mewakili Dirut menandatangani dokumen apabila Dirut berhalangan 13. Mewakili Dirut pd pertemuan urusan perusahaan jika Dirut berhalangan 14. Bertanggungjawab pd ops bank, penyimpanan srt berharga, pelayanan thd nsbh 15. Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah 16. Memastikan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah diterapkan dan dilaks oleh unit kerja terkait 17. Memantau pelaks penerimaan nsbh sesuai dgn kebijakan yg ditetapkan 18. Memantau pengkinian profil nasabah dan transaksinya 19. Melakukan analisa dan menetapkan keputusan akhir atas transaksi yg mencurigakan 20. Memantau penyusunan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya pd PPATK 21. Memantau keb dan pelaks pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 22. Memastikan dlm pelaks penerimaan nsbh telah mempertimbangkan Negara, bid usaha yg diklasifikasikan resiko tinggi, dlm kegiatan pencucian uang 23. Tdk memberitahukan pd pengguna js keuangan /org lain baik secara langsung ataupun tdk langsung dgn cara apapun mengenai LTKM yg telah disampaikan pd PPATK 24. Memantau penyampaian LTKM pd PPATK maks 3 HK jk mengetahui adanya trans keuangan mencurigakan 25. Memastikan adanya system pencatatan dalam rangka memudahkan identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	



1	Nama	: SITI FATIMAH,SE
	NIK	:
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan langkah yg diperlukan utk memastikan BPR telah memenuhi peraturan OJK dn peraturan per UU lain dlm rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;2. Mantau dn menjga kegiatan BPR tdk menyimpang dr peraturan per UU; 3. Mantau dn menjga kepatuhan BPR thd seluruh komitmen yg dibuat BPR pd OJK; 4. Mencegah Dir BPR tdk menetapkan kebijakan yg menyimpang dri peraturan OJK dn per UU; 5. melaporkan pelaksanaan tgas dn Tanggungjawabnya scr berkala pd Dirut tmbusan Dekom; 6. Pengawasan thd APU PPT; 7. Memastikan bank memiliki kebijakan dn prosedur APU PPT; 8. mengusulkan kebijkan dn prosedur tertulis yg bersifat strategis mengenai penerapan APU PPT pd Dekom; 9. Memastikan penerapan APU PPT dilaksanakan sesuai dg kebijakan dn prosedur; 10. Membntuk UKK penerapan APU PPT; 11. Melakukan pengawasan kepatuhan unit kerja dlm menerapkan program APU PPT; 12. Memastikan kebijakn dn prosedur tertulis mengenai penerapan APU PPT sejalan dg perubahan dn pengembangan produk, jasa dn teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai perkembangan modus PU PT; 13. Memastikan bahwa seluruh pegawai khususnya pegawai dr satuan kerja terkait dn pegawai baru telah mengikuti pelatihan berkaitan dg penerpan APU PPT scr berkala; 14. Menetapkan wewenang dn tanggungjawab yg jls pd setiap jenjang jabatan yg terkait dg penerapan Manrisk; 15. Menyusun kebijkan dn pedoman penerapan Manrisk scr tertulis; 16. Mengevaluasi dn memutuskan transaksi yg memerlukan persetujuan DIR; 17. Menerapkan budaya Manrisk pd slrh jenjang organisasi; 18. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yg trkait dg MR; 19. Memastikan bahwa fungsi MR tlh beroperasi scr independen;20. Bertanggungjwb ats pelaksanaan kebijkan MR, eksponsur resiko;21. Dlm anggota Dir yg membawahkan fungsi kepatuhan merupakan Direktur Utama, Anggota Dir yg membawahkan fungsi kepatuhan wjb melaporkan pelaksanaan tgs dn tanggungjawabnya scr berkala kpd dekom
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
<p>Direksi PT. BPR. Dharma Indra telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, yaitu : telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang terutama</p>		



kredit retail dan melakukan realisasi kredit fintech (yang masih dalam proses persetujuan OJK). Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: FY RUDDY PRIHANANTO
	NIK	:
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pd tiap keg usaha BPR 2. Melaks pengawasan pelaks tgs dan tanggungjwb Dir, memberi nasihat pd Dir 3. Melaks pengawasan, mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaks kebijakan strategis BPR 4. Dilarang ikut serta pengambilan keputusan kegiatan ops BPR 5. Pengambilan keputusan Dekom merupakan bagian dr tgs pengawasan shg tetap jd tanggungjwb Dir atas pelaks kepengurusan BPR. 6. Memastikan Dir menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dr pejabat yg bertanggungjwb 7. Memberitahukan pelanggaran per UU di bid keuangan dan perbankan, keadaan yg membahayakan usaha BPR pd OJK 8. Menyediakan wkt ckp utk melaks tgs dan tanggungjwb 9. Memiliki dan melaks pedoman, tatib krj Dekom 10. Menyelenggarakan rapat mengenai RBB, isu strategis, evaluasi kebijakan strategis dan RRBB 11. Meminta Dir utk menjelaskan ttg permasalahan, kinerja, kebijakan ops BPR 12. Dilarang menggunakan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga yg merugikan BPR 13. Dilarang mengambil dan menerima keuntungan pribadi dr BPR selain remunerasi yg ditetapkan RUPS 14. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya, hub keuangan, keluarga dgn anggota Dekom lain, Dir, pemegang saham BPR, remunerasi dan fasilitas lain yg diterima 15. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan MR 16. Memastikan penerapan MR oleh Dir 17. Mengevaluasi pertanggungjawaban Dir atas pelaks Kebijakan MR 18. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Dir yg berkaitan dgn trans yg memerlukan persetujuan Dekom 19. Memberikan persetujuan kebijakan, prosedur penerapan APU/PPT yg diusulkan dir 20. Melaks pengawasan pelak tanggungjwb Dir thd penerapan APU/PPT 21. Memastikan adanya pembahasan terkait PU/PPT dlm rapat Dir dan Dekom 22. Melaks pengawasan thd pelaks RBB 23. Membuat Lap pengawasan RRBB dan melaporkan pd OJK 24. Mengarahkan, memantau renc pengembangan dan pengadaan TI BPR 25. Mengevaluasi



		pertanggungjwb Dir terkait penyelenggaraan TI BPR 26.Mempresentasikan hsl pengawasan thd BPR jk diminta OJK
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: ESTI RAHAYU,SE
	NIK	:
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pd tiap keg usaha BPR 2. Melaks pengawasan pelaks tgs dan tanggungjwb Dir, memberi nasihat pd Dir 3. Melaks pengawasan, mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaks kebijakan strategis BPR 4. Dilarang ikut serta pengambilan keputusan kegiatan ops BPR 5. Pengambilan keputusan Dekom merupakan bagian dr tgs pengawasan shg tetap jd tanggungjwb Dir atas pelaks kepengurusan BPR 6. Memastikan Dir menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dr pejabat yg bertanggungjwb 7. Memberitahukan pelanggaran per UU di bid keuangan dan perbankan, keadaan yg membahayakan usaha BPR pd OJK 8. Menyediakan wkt ckp utk melaks tgs dan tanggungjwb 9. Memiliki dan melaks pedoman, tatib krj Dekom 10. Menyelenggarakan rapat mengenai RBB, isu strategis, evaluasi kebijakan strategis dan RRBB 11. Meminta Dir utk menjelaskan ttg permasalahan, kinerja, kebijakan ops BPR Dilarang menggunakan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga yg merugikan BPR 13. Dilarang mengambil dan menerima keuntungan pribadi dr BPR selain remunerasi yg ditetapkan RUPS 14. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya, hub keuangan, keluarga dgn anggota Dekom lain, Dir, pemegang saham BPR, remunerasi dan fasilitas lain yg diterima 15.Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan MR 16.Memastikan penerapan MR oleh Dir 17.Mengevaluasi pertanggungjawaban Dir atas pelaks Kebijakan MR 18.Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Dir yg berkaitan dgn trans yg memerlukan persetujuan Dekom 19. Memberikan persetujuan kebijakan, prosedur penerapan APU/PPT yg diusulkan dir 20. Melaks pengawasan pelak tanggungjwb Dir thd penerapan APU/PPT 21. Memastikan adanya pembahasan terkait PU/PPT dlm rapat Dir dan Dekom 22.Melaks pengawasan thd pelaks RBB 23.Membuat Lap pengawasan RRBB dan melaporkan pd OJK 24.Mengarahkan, memantau renc pengembangan dan pengadaan TI BPR 25.Mengevaluasi pertanggungjwb Dir terkait penyelenggaraan TI BPR 26.Mempresentasikan hsl pengawasan thd BPR jk diminta OJK
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	



1	Nama	: EDDY JUSWONO WIJONO
	NIK	:
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pd tiap keg usaha BPR 2. Melaks pengawasan pelaks tgs dan tanggungjwb Dir, memberi nasihat pd Dir 3. Melaks pengawasan, mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaks kebijakan strategis BPR 4. Dilarang ikut serta pengambilan keputusan kegiatan ops BPR 5. Pengambilan keputusan Dekom merupakan bagian dr tgs pengawasan shg tetap jd tanggungjwb Dir atas pelaks kepengurusan BPR 6. Memastikan Dir menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dr pejabat yg bertanggungjwb 7. Memberitahukan pelanggaran per UU di bid keuangan dan perbankan, keadaan yg membahayakan usaha BPR pd OJK 8. Menyediakan wkt ckp utk melaks tgs dan tanggungjwb 9. Memiliki dan melaks pedoman, tatib krj Dekom 10. Menyelenggarakan rapat mengenai RBB, isu strategis, evaluasi kebijakan strategis dan RRBB 11. Meminta Dir utk menjelaskan ttg permasalahan, kinerja, kebijakan ops BPR 12. Dilarang menggunakan BPR utk kepentingan pribadi, keluarga yg merugikan BPR 13. Dilarang mengambil dan menerima keuntungan pribadi dr BPR selain remunerasi yg ditetapkan RUPS 14. Mengungkapkan kepemilikan sahamnya, hub keuangan, keluarga dgn anggota Dekom lain, Dir, pemegang saham BPR, remunerasi dan fasilitas lain yg diterima 15. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan MR 16. Memastikan penerapan MR oleh Dir 17. Mengevaluasi pertanggungjawaban Dir atas pelaks Kebijakan MR 18. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Dir yg berkaitan dgn trans yg memerlukan persetujuan Dekom 19. Memberikan persetujuan kebijakan, prosedur penerapan APU/PPT yg diusulkan dir 20. Melaks pengawasan pelak tanggungjwb Dir thd penerapan APU/PPT 21. Memastikan adanya pembahasan terkait PU/PPT dlm rapat Dir dan Dekom 22. Melaks pengawasan thd pelaks RBB 23. Membuat Lap pengawasan RRBB dan melaporkan pd OJK 24. Mengarahkan, memantau renc pengembangan dan pengadaan TI BPR 25. Mengevaluasi pertanggungjwb Dir terkait penyelenggaraan TI BPR 26. Mempresentasikan hsl pengawasan thd BPR jk diminta OJK

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
 Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.



Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -



B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	YETI KUSWINDARYANTI,SE,M.HUM		-	-
2	IR.MADURATNASARI,M.HUM		-	-
3	SITI FATIMAH,SE		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	YETI KUSWINDARYANTI,SE,M.HUM		600924	PT. BPR. ANTAR PARAMA	-
2	IR.MADURATNASARI,M.HUM		600924	PT. BPR. ANTAR PARAMA	-
3	SITI FATIMAH,SE		600924	PT. BPR. ANTAR PARAMA	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	YETI KUSWINDARYANTI,SE, M.HUM		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	IR.MADURATNASARI,M.HUM		tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	SITI FATIMAH,SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	YETI KUSWINDARYANTI,SE, M.HUM		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	IR.MADURATNASARI,M.HUM		tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	SITI FATIMAH,SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada



D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	FY RUDDY PRIHANANTO		-	-
2	ESTI RAHAYU,SE		-	-
3	EDDY JUSWONO WIJONO		7.720.000.000	85,78%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	FY RUDDY PRIHANANTO		600924	PT. BPR. ANTAR PARAMA	-
2	ESTI RAHAYU,SE		600924	PT. BPR. ANTAR PARAMA	-
3	EDDY JUSWONO WIJONO		600924	PT. BPR. ANTAR PARAMA	42,34%

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	FY RUDDY PRIHANANTO		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ESTI RAHAYU,SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	EDDY JUSWONO WIJONO		tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	FY RUDDY PRIHANANTO		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ESTI RAHAYU,SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	EDDY JUSWONO WIJONO		tidak ada	tidak ada	tidak ada



F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	948.000.000	3	630.000.000
2	Tunjangan	3	0	3	0
3	Tantiem	3	0	3	0
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	3	0
5	Remunerasi lainnya	3	98.750.000	3	65.625.000
Total			1.046.750.000		695.625.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	NIHIL	NIHIL
2	Transportasi	KENDARAAN RODA 4	KENDARAAN RODA 4
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	BPJS Tenaga Kerja dan Pensiun	BfJS Tenaga Kerja dan Pensiun

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,30	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,75	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,48	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,34	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,26	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan



1	2022-3-31	3	Rapat Dewan Komisaris I tahun 2022 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Evaluasi Kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa hasil yang dicapai masih belum memenuhi target RBB tahun 2021 akan tetapi Rasio-rasio keuangan masih menunjukkan nilai yang sehat dan laba yang dibukukan masih positif. Komisaris berharap bahwa setiap kegiatan operasional yang dijalankan berpedoman dan mengacu pada RBB tahun 2022 yang sudah dibuat dan target yang belum tercapai pada Tahun 2021 akan dapat tercapai pada Tahun 2022. 2. Pertumbuhan Kredit dan Penurunan Kredit Bermasalah, yaitu pada awal triwulan I pertumbuhan kredit masih stagnan belum tumbuh secara maksimal, diharapkan pada triwulan ke II kredit akan semakin tumbuh dan kredit bermasalah secara optimal dapat tertagih sehingga NPL di triwulan ke II akan menurun. 3. Strategi untuk mencapai target RBB semester I tahun 2022, yaitu untuk dapat tercapainya target RBB di semester I perlu perbaikan di semua divisi serta kerjasama antar divisi baik itu divisi kredit, divisi operasional dan semakin tajamnya peran PEAL dan PEMR dalam fungsi kerjanya
2	2022-7-1	3	Rapat Dewan Komisaris II tahun 2022 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. APU PPT, yaitu Laporan penerapan APU PPT sudah terkirim ke OJK Dan Laporan Nihil atas pemblokiran secara serta merta DTTOT secara rutin sudah terkirim ke OJK dan pihak terkait. 2. Isu-Isu Strategis BPR, yaitu Bank terus meningkatkan dana murah Tabungan agar memperkecil biaya dana, bank terus melakukan inovasi produk untuk mendongkrak jumlah kredit agar dana pihak ketiga yang telah dihimpun bisa disalurkan secara maksimal dan meningkatkan jumlah LDR. 3. Evaluasi/Penetapan Strategi BPR, yaitu Kemampuan SDM lebih ditingkatkan lagi agar bisa membantu management dalam mencapai target-target yang telah dibuat. 4. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, yaitu Meningkatkan jumlah kredit yang diberikan dan mengintensifkan penagihan debitur kolektibilitas 3,4 dan 5 agar jumlah NPL bisa turun dan tercapainya RBB yang telah dibuat
3	2022-10-3	3	Rapat Dewan Komisaris III tahun 2022 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Perkembangan KYD & NPL Triwulan III Tahun 2022, yaitu Target pertumbuhan KYD masih belum tercapai dan Adanya kenaikan jumlah NPL dikarenakan ada debitur yang turun ke kolektibilitas 3 sehingga mengakibatkan adanya kenaikan NPL. Dekom mengharapkan pada Triwulan IV pertumbuhan KYD naik secara optimal dan jumlah Kolektibilitas akan turun sesuai dengan yang di targetkan di RBB tahun 2022. 2. Kerjasama dengan Fintech Komunal, yaitu Untuk mendongkrak jumlah KYD bank bekerjasama dengan Fintech Komunal dan sudah melakukan uji coba, Dekom menghimbau meskipun bekerja sama dengan Fintech bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian agar KYD yang didapat dari Fintech tidak ada yang menjadi NPL. 3. Optimalisasi Pencapaian RBB dari Dana Pihak Ketiga, yaitu Terkait untuk penambahan jumlah dana murah Tabungan bank telah melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menabung tabungan pelajar (SIMPEL), disamping untuk menambah NOA juga bisa membuat bank semakin dikenal di masyarakat khususnya pelajar di Lumajang 4. Optimalisasi Sumber Daya manusia (SDM), yaitu Untuk memperkuat kemampuan karyawan, setiap bulan selalu diadakan sosialisasi dan pelatihan baik secara intern, ekstern, zoom dan tatap muka. Karena bank yang tangguh tergantung dari SDM bank itu sendiri. Dekom berharap selalu diadakan review dan penilaian buat semua karyawan agar bisa tau kelemahan apa yang harus segera diperbaiki.
4	2022-12-5	3	Rapat Dewan Komisaris IV tahun 2022 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Dewan komisaris mengusulkan dan memberikan rekomendasi penunjukan AP/KAP Adi Darmawan, CPA dan KAP Moh Wildan & Adi Darmawan, yang akan di RUPS kan. 2. Dewan Komisaris menyetujui penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pengembangan BPR.



5	2022-12-8	3	Rapat Dewan Komisaris V tahun 2022 dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Insentif diberikan dengan pertimbangan untuk memaintenance karyawan sehingga loyal dan tidak berpindah ke perusahaan lain khususnya untuk karyawan yang telah mempunyai kompetensi di bidangnya sekaligus memberikan apresiasi thd produktivitas kerja selama tahun 2022. Pembagian Insentif yg diusulkan adalah sebesar 1X gaji pokok dasar pembagiannya akan di dasrkan pada KPI (Key Performance Indikator) atau penilaian prestasi kerja pada tahun 2022. 2. Untuk lebih memberikan stabilitas biaya khususnya biaya tenaga kerja maka untuk tahun 2023 serta untuk meringankan beban biaya secara keseluruhan maka untuk insentif tahun 2023 akan dicadangkan sebesar minimal 2 kali gaji pokok , yang biayanya akan di bebaskan setiap bulannya. Pembagian insentif tsb nantinya akan berbasis pada KPI tahun 2023. 3. KPI akan dibuat berdasarkan level manajerial dan level technical sesuai dengan bobot kerja pada masing-masing level pada struktur organisasi PT. Bpr Dharma Indra. KPI untuk para petugas sales akan dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dari target yang di bebaskan secara individu yang berasal dari turunan RBB yang dibuat oleh Direksi PT. Bpr Dharma Indra sedangkan KPI untuk bagian internal (Operasional) akan dinilai dalam bentuk proses kerja yang intinya bedasarkan indikator kecepatan proses, ketepatan proses dan keakuratan hasil dalam menjalankan proses. Bagi karyawan yang memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan akan mendapatkan reward yang setimpal dengan kinerja pribadi sedangkan yang tidak mencapai dan terjadi penyimpangan SOP akan dikenakan punishment sesuai dengan pedoman pemberian sanksi yang telah dibuat oleh manajemen yang tertuang pada Peraturan Perusahaan. 4. Untuk menjaga kesehatan karyawan mengingat bahwa karyawan merupakan aset produktif PT. Bpr Dharma Indra maka bank untuk kedepannya memberikan fasilitas berupa asuransi kesehatan dikarenakan selama BPJS tidak mengcover
---	-----------	---	---

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	FY RUDDY PRIHANANTO		5	0	100,00%
2	ESTI RAHAYU,SE		5	0	100,00%
3	EDDY JUSWONO WIJONO		5	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-



J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	Eddy Juswono	Komisaris Utama		Yeti Kuswindaryanti	Direktur Utama		Sewa Kantor Tempursari	240	Sewa gedung Kantor Tempursari selama masa sewa 5 (lima) tahun sebesar Rp.240 juta terhitung mulai tanggal 16 Juli 2022 s/d. tanggal 16 Juli 2027



L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2022-04-08	Sosial	Pembagian zakat fitrah kepada kaum duafah disekitar kantor PT. BPR. Dharma Indra Lumajang	Kaum Duafah	4.948.000
2	2022-04-14	Sosial	Pemberian bantuan untuk umat gereja yang kurang mampu	Gereja	1.000.000
3	2022-06-30	Sosial	Bantuan untuk hari lingkungan hidup sedunia	Pemda Lumajang	500.000
4	2022-07-05	Sosial	Pemberian sembako untuk umat gereja yang kurang mampu	Gereja	1.000.000
5	2022-07-22	Sosial	Bantuan dana untuk acara bersih desa di Tempursari Lumajang	Balai Desa Tempursari Lumajang	200.000
6	2022-08-05	Sosial	Acara edukasi dan literasi tabungan SIMPEL dan pemberian printer kepada SDN Kepuharjo 1 Lumajang	SD Negeri Kepuharjo 01	2.806.300
7	2022-08-15	Sosial	Pemberian bantuan nasi tumpeng untuk acara HUT RI ke 77 Pasirian Lumajang	Balai Desa Pasirian	250.000
8	2022-08-16	Sosial	Pemberian bantuan nasi tumpeng untuk acara HUT RI ke 77 Tempursari Lumajang	Balai desa Tempursari	250.000
9	2022-08-29	Sosial	Bantuan pawai karnaval SDN Kepuharjo 01 Lumajang	SDN Kepuharjo 01	250.000
10	2022-09-22	Sosial	Bantuan untuk umat gereja yang kurang mampu	Gereja	1.000.000
11	2022-10-10	Sosial	Acara edukasi Literasi kepada masyarakat umum yang diselenggarakan bersama dengan anggota Perbarindo di Balai Desa Balung	Biaya Akomodasi	1.080.000
12	2022-10-23	Sosial	Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dengan anggota Perbarindo Jember (Duta Batik untuk LJK)	Biaya Akomodasi	2.028.500
13	2022-10-21	Sosial	Bantuan peringatan hari Santri di Tempursari Lumajang	Kelurahan Tempursari Lumajang	150.000



M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dharma Indra ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dharma Indra. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dharma Indra ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dharma Indra, Terima Kasih.

LUMAJANG, 31 Januari 2023

Persetujuan Pengurus PT. BPR Dharma Indra




EDDY JUSWONO WIJONO
Komisaris Utama

YETI KUSWINDARYANTI, SE, M. HUM
Direktur Utama

I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Sangat Baik	1,26
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Sangat Baik	1,61
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Baik	2,50
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Baik	1,87
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Baik	1,98
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Sangat Baik	1,00
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Baik	1,96
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Baik	1,90
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS	0,075	Baik	1,94
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0,075	Sangat Baik	1,70

II. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Dharma Indra telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Dharma Indra

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap
2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap

LUMAJANG, 31 Januari 2023
Pengurus PT. BPR Dharma Indra


EDDY JUSWONO WIJONO
Komisaris Utama


YETI KUSWINDARYANTI, SE, M. HUM
Direktur Utama



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Dharma Indra

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505809-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600886-31012023184625

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

kuswindaryanti@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-31 18:46:25



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.5276/GCG/DPP-PERBARINDO/II/2023

Kepada Yth,

PT BPR DHARMA INDRA

JL. SOEKARNO HATTA NO. 8 - 10 SUKODONO LUMAJANG PROV. JAWA TIMUR

KETERANGAN
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2022 dari PT BPR DHARMA INDRA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 31 Januari 2023

PERBARINDO

MediaBPR

Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

TANDA TERIMA

No.5276/GCG/Media-BPR/I/2023

Kepada Yth,
PT BPR DHARMA INDRA
JL. SOEKARNO HATTA NO. 8 - 10 SUKODONO LUMAJANG PROV. JAWA TIMUR

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2022 dari PT BPR DHARMA INDRA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 31 Januari 2023

Media BPR-PERBARINDO